



Penanganan Kawasan Kumuh Tak Hanya Fisik

JOGJA, BERNAS – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat siap menggelontorkan dana sekitar Rp 10 triliun yang akan digunakan untuk penanganan kawasan kumuh di 269 kota/kabupaten di Indonesia. Penanganan kawasan kumuh tidak hanya berbentuk pembangunan fisik tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

“Total dana yang akan digunakan oleh setiap kabupaten/kota tidak sama, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan atau usulan berdasarkan perencanaan yang disusun,” kata Sri Hartoyo, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di sela-sela kunjungan ke Karangwaru Riverside, Selasa (15/11) kemarin.

Meski menyiapkan dana cukup banyak, namun Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak ingin

provinsi, atau kota dan kabupaten hanya berpangku tangan menunggu bantuan dari pusat.

“Provinsi, kabupaten/kota tetap harus memberikan pendampingan di daerah masing-masing agar program penanganan kawasan kumuh bisa berjalan dengan baik,” katanya yang menyebut ada lebih dari 23.000 hektare kawasan kumuh di Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mo-chamad Basoeki Hadimoeljono yang juga hadir di Karangwaru Riverside mengatakan, program penanganan kawasan kumuh dilakukan dengan menggerakkan masyarakat sekitar.

Salah satu program penanganan kawasan kumuh yang sedang gencar dilakukan pemerintah adalah melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang mengedepankan keterlibatan masyarakat.

► ke hal 15

Penanganan Kawasan

Sambungan dari halaman 9

HENDRA NURDIYAH/ANTARA

"Kegiatan yang dilakukan di Karangwaru Riverside adalah salah satu contoh pelaksanaan program penanganan kumuh berbasis masyarakat. Warga terlibat dalam kegiatan penanganan kawasan kumuh," katanya.

Kegiatan penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Karangwaru, khususnya kawasan yang berada di sepanjang bantaran Sungai Buntung dilakukan dengan bantuan dari Kementerian PUPR sejak 2010.

Warga di sekitar membagi kawasan sungai menjadi enam segmen, dengan kegiatan penanganan kawasan kumuh yang berbeda-beda di tiap segmennya. Warga sudah menuntaskan kegiatan di segmen satu dan dua, serta di segmen empat berjalan 30 persen. Sedangkan untuk segmen tiga, lima dan enam belum dilakukan penanganan.

Penanganan dilakukan dengan membangun jalan lingkungan di bantaran sungai, mengubah muka rumah sehingga menghadap sungai serta menyediakan ruang terbuka publik untuk kegiatan interaksi masyarakat sekitar.

"Kegiatan yang sudah dilakukan di Karangwaru sangat baik dan bisa dijadikan contoh. Mungkin akan lebih menarik jika diselipkan cerita sejarah mengenai daerah ini," kata Basoeki.

Tegalrejo yang akrab dengan sosok Pangeran Diponegoro, bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan wilayah Karangwaru menjadi kawasan wisata historis dengan mengambil Pangeran Diponegoro yang juga terkenal sebagai ahli tata ruang. "Dari sini diharapkan generasi muda dapat mengenal semangat kepahlawanan Pangeran Diponegoro," ungkapnya.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Puan Maharani mengaku kaget dengan kondisi bantaran Sungai Buntung khususnya di Karangwaru karena sudah tertata dengan baik. "Kondisi jalan, lingkungan, rumah warga dan sungai sudah bersih dan sehat. Ini harus menjadi contoh," katanya.

Di dalam kegiatan tersebut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga berjanji untuk segera mengalokasikan dana sekitar Rp 500 juta untuk pengembangan Karangwaru Riverside.

TINJAU KARANGWARU -- Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nita F. Moeloek, bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meninjau program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di bantaran Sungai Karangwaru, Selasa (15/11) kemarin.

Tak hanya fisik

Selain di Karangwaru, kegiatan penanganan kawasan kumuh berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta juga dilakukan di empat kelurahan lain yaitu Gowongan, Suryatmajan, Ngampilan dan Keparakon.

"Penanganan kawasan kumuh tidak hanya dilakukan dengan pembangunan fisik, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya," kata Hendra Tantular, Kepala Bidang Permukiman dan Saluran Air Limbah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

Ia mencontohkan, penanganan kawasan kumuh di Ngampilan dilakukan dengan membangun rumah deret, di Suryatmajan dilakukan dengan menata ruang terbuka publik di bantaran Sungai Code sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan wisata.

"Penanganan rumah tidak layak huni juga terus dilakukan sebagai bagian dari pengentasan kawasan kumuh," katanya.

Pada 2017, sudah terseleksi sebanyak 197 rumah tidak layak huni dari 500 rumah tidak layak huni yang diusulkan untuk memperoleh dana rehabilitasi.

Sementara itu, pendamping program Kotaku dari Kelurahan Karangwaru, Subandono, mengatakan mimpi warga Karangwaru selama ini akan lingkungan yang bersih dan bebas banjir sudah terwujud melalui Program Kotaku. Ini tidak lepas dari tekad kuat dari warga Karangwaru itu sendiri.

"Ini merupakan mimpi warga Karangwaru yang sudah terbeli. Dulunya pada tahun 2009 Karangwaru terkenal sebagai kawasan kumuh, bahkan Sungai Buntung mendapat predikat sebagai tempat pembuangan sampah terpanjang," kata dia.

Dari situ warga saling menyadarkan untuk memperbaiki Karangwaru. "Keinginan kami tersebut ditangkap oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR yang kemudian memfasilitasi kami melalui Kotaku," kata Subandono.

Kelurahan Karangwaru merupakan satu dari sepuluh Kelurahan yang menjadi sasaran program Kotaku. Beberapa perbaikan yang dilakukan antara lain revitalisasi bantaran Sungai Buntung sehingga mampu meminimalisasi bencana banjir.

Selain itu dilakukan juga pembangunan akses jalan lingkungan, jembatan penghubung, serta pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Salah satu hasil pembangunan adalah Omah Sinau Masyarakat dan Anak Sekolah atau Om Simas. Ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan anak-anak untuk bermain dan belajar. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005